

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

Abdullah Tauda, Gunawan, 2012, *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta.

Arifin, Firmansyah, *dkk.*, *lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, diterbitkan oleh KHRN bekerjasama dengan MKRI, Jakarta.

Arifin Mochtar, Zainal, 2016, *Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ashsofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Assiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta.

Bohari, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Budiarjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi: cetakan ketiga, Gramedia Utama, Jakarta.

Collin, P.H. 2004, *Dictionary of Law, Fourth Edition*, Bloomsbury, London, England.

Djafar Saidi, Muhamad, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Djuani Kadmasasmita, Achmad, *Akuntabilitas Keuangan Negara : Konsep dan Aplikasi*, STIA LAN, Jakarta.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Funk, William F. and Richard H. Seamon, 2001, *Administrative Law: Examples and Explanation*, Aspen Publishers, New York.
- Hakim, Lukman 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Hamzah, Andi 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, UII Press.
- , 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2016, *Jangan Bunuh KPK : Kajian Hukum Tata Negara Penguat Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publishing, Malang.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan I, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, September 2006.
- M. Gaffar, Jenedjri, *et.al.*, 2010, “*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku VI Kekuasaan Kehakiman)*”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. hlm.349.
- M. Hadjon, Philipus, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.

Nugraha, Safri, *dkk*, 2009, *Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler*, Pusat Perencanaan Pembagunan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham, Jakarta.

Riyanto, Sigit, *dkk*, 2013, *Keterampilan Hukum : Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1993, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung.

Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Soeria Atmadja, Arifin P., 2005, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Praktik dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Sumardjono, Maria SW., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tjandra, Riawan, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

Turnbull, Joanna, *et. al.*, 2015, *Oxford Advanced Learner's Dictionary, eight edition*, Oxford University Press, United Kingdom.

Verhoest, Koen, *et. all*, 2010, *Autonomy and Control of State Agencies, Comparing State Agencies*, United Kingdom, Palgrave Macmillan.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan dan Kedudukan Protokol, Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan dan Kedudukan Protokol, Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006).

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2009 tentang Hak Keuangan/ Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial Beserta Janda/ dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 163).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan dan Kedudukan Protokol, Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 248).

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 248).

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/ PMK. 02/ 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial.

### C. MAKALAH, LAPORAN PENELITIAN, SKRIPSI, TESIS, DAN, JURNAL

Abdullah Tauda, Gunawan, 2011, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Arifin Mochtar, Zainal, 2012, *Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly, ” Struktur ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945”, *Makalah* pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakkan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

\_\_\_\_\_, “Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik”, *Makalah* yang disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di Universitas Andalas, Padang, September 2015.

Bruce Ackerman, *The New Separatioan of Power*, The Harvard Law Review, Volume 113, HVLR 633, Januari, 2000.

Hernani, *Studi Tentang Penerapan Keprotokolon di Kantor Gubernur propinsi Kalimantan Timur*, e-Journal Ilmu Komunikasi Fisip Unmul, Volume 2, Nomor 3, 2014.

Isa Sya'roni, Muhammad, *Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Al-daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 5, Nomor 1, April, 2015.

Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara, *Sumber-Sumber Keuangan Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta 2010.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Nugraha, Safri, *dkk*, 2009, *Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol*, Pusat Perencanaan Pembagunan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham, Jakarta.

Peneitian dan Pengkajian MK-RI, 2005, *Teori Mengenai Anggaran Negara*, Sekretariat MK-RI, Jakarta.

Ramadani, Rizky, 2016, *Independensi Lembaga Negara Independen di Indonesia (Studi Dalam Konsep Independent Regulatory Agencies)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tohari, A. Ahsin *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan*, dalam Jentera Jurnal Hukum, Edisi 12, 2006, Jakarta.

Uli Panusunan Simanungkalit, Janry, 2012, *Sistem Kompensasi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia (Suatu Analisis Kompensasi dan Pilihan Strategis Kompensasi Pegawai Negeri Sipil pada Kemtenrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Gunung Kidul, dan Pemerintah Kota Depok)*, *Disertasi* pada Departemen Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Wulandari, 2014, *Desentralisasi Lembaga Negara Independen dalam Negara Kesatuan*, Tesis pada Program Pasca Sarjana fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Bulletin Komisi Yudisial, Volume I No. 5 April 2007

#### **D. INTERNET**

Asshiddiqie, Jimly, "Membangun Sistem kelembagaan Pasca Perubahan UUD 1945", <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/302/315>. Diakses Pada tanggal 3 April 2017.

- Hukum Online, "Tahun Depan Gaji Pejabat Negara Akan Dinaikkan", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ae955647310c/tahun-depan-gaji-pejabat-negara-akan-dinaikkan>. Diakses pada tanggal 19 April 2017.
- Kementerian Dalam Negeri, "DKPP Minta Status KPU dan Bawaslu Jadi Pejabat Negara", <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/01/31/dkpp-minta-status-kpu-dan-bawaslu-jadi-pejabat-negara>. Diakses Pada tanggal 21 Maret 2017.
- Komisi Yudisial, "Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial" <http://www.komisiyudisial.go.id>. Diakses pada 14 Maret 2017.
- Kompas, "Mendagri Usul Komisioner KPU dan Bawaslu Jadi Pejabat Negara", <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/14/22450771/mendagri.usul.komisioner.kpu.dan.bawaslu.jadi.pejabat.negara>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.
- Kompas, "Pemerintah Akan Ubah Skema Peggajian PNS", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/15/1559251/Pemerintah.Akan.Ubah.Skema.Penggajian.PNS>. Diakses pada tanggal 22 April 2017.
- Kompas, "Sepinya Perumahan KPU" <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/30/0633280/Sepinya.Perumahan.KPU>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2017.
- Metro Bali, "Sistem Penggajian Pejabat Negara Perlu Dievaluasi", <http://metroballi.com/2014/09/09/pengamat/-sistem-penggajian-pejabat-negara-perlu-dievaluasi>. Diakses pada tanggal 27 April Tahun 2017.
- Okezone, "Hakim Pejabat Negara Eit Tunggu Dulu", <http://news.okezone.com/read/2017/03/16/337/1644622/hakim-pejabat-negara-eit-tunggu-dulu>. Diakses Pada tanggal 1 April 2017.
- Tribun News, "Mantan Wakil Ketua DPRD Kolaka Enggan Kembalikan Mobil Dinas", <http://www.tribunnews.com/regional/2015/02/19/mantan-wakil-ketua-dprd-kolaka-enggan-kembalikan-mobil-dinas>. Diakses pada tanggal 25 April 2017.
- WikiaPBN, "Tingkat Perjalanan Dinas Komisioner KPU", <http://helpdeskapk.wikiapbn.org/artikel/tingkat-perjalanan-dinas-komisioner-kpu/>. Diakses Pada tanggal 11 Maret 2017.